

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang dilaksanakan antara Indonesia-Korea Selatan dalam bidang Transfer of Technology pada pembuatan kapal selam periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa dasar kebijakan dalam kerjasama pemerintah Indonesia dengan Republik Korea, yaitu (1). MOM antara pemerintah Indonesia dengan Republik Korea tanggal 2-4 September 2013 tentang *3rd Defense Industry Cooperation Committee Meeting*. (2) MOM antara pemerintah Indonesia dengan Republik Korea tanggal 28-29 August 2013 tentang *1st Defense Industry Cooperation Committee Meeting*. (3) Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor KEP/15/KKIP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang penugasan kepada PT PAL Indonesia (persero) dalam pembangunan kapal selam ke 3. (4) Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor KEP/04/ XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang penguasaan teknologi kapal selam, dimana skema yang dijalankan atas dasar *Local Production/Joint Production* pembahasan amandemen kontra dan *Joint Operation Agreement* dengan DSME sesuai dengan skema yang digarapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama tersebut melibatkan transfer teknologi dimana Kemhan dapat mengirimkan tenaga-tenaga ahli yang dikirim pemerintah tidak hanya sebatas *learning by seeing* (belajar dengan cara mengamati), namun juga *learning by doing* (belajar dengan cara mempraktikkan). Selanjutnya dengan adanya kerjasama ini maka pihak Indonesia sebelum memulai produksi satu unit kapal selam akan membangun sejumlah infrastrukturnya terlebih dahulu, sehingga ke depan bisa dilanjutkan dengan produksi secara mandiri. Secara keseluruhan mekanisme pembangunan kapal selam yang antara Indonesia-Korea Selatan dilakukan di bawah kerangka *defense offset* yang pada dasarnya adalah proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen atau pemasok

persenjataan sebagai imbalan dari kesepakatan pembelian jasa dan barang-barang militer.

Kedua, terdapat alasan untuk menjalin kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam, yaitu Kebutuhan Indonesia akan membangun industri pertahanan dimana industri pertahanan itu sendiri memiliki berbagai efek menguntungkan baik dari segi peningkatan postur pertahanan namun juga nilai Indonesia di mata negara dunia lainnya. Dengan kemandirian dalam memenuhi dan mengelola peralatan alutsista maka Indonesia dapat melepaskan diri dari ketergantungan.

VI.2 Saran

1. Dalam merealisasikan MEF Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia tiap tahunnya hingga mencapai U\$10.0 dengan presentasi terhadap GDP 0.9%. Namun, untuk negara seluas Indonesia harusnya anggaran pertahanan terhadap GDP mencapai 1,5%. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan Indonesia kedepannya karena mengingat anggaran pertahanan suatu negara merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kekuatan pertahanan.

2. Dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia harusnya lebih memegang kendali dalam proses pembuatan Alutsista dalam setiap kerjasamanya sehingga Transfer teknologi mudah untuk didapatkan oleh teknisi Indonesia. Sehingga kedepannya dapat digunakan untuk memajukan Industri Pertahanan dalam negeri Indonesia.